Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Mencapai Rp 1,3 Triliun

Sumber gambar:
https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/27/belanja-pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan-dari-pelaku-umkm-mencapai-rp-13-triliun

Pemerintah mengembuskan angin segar kepada UMKM dengan adanya instruksi dari Mendagri. Diketahui, Mendagri Tito Karnavian minta pemerintah daerah mengalokasikan 40 persen APBD untuk belanja produk atau jasa dari pelaku UMKM. Kebijakan itu dapat mendorong belanja terhadap UMKM hingga Rp 200 triliun.

Kepala Bappeda Kalsel, Ariyadi, Selasa (26/4/2022), mengatakan, alokasi anggaran barang dan jasa Pemprov Kalsel hampir 82 persen. Sedangkan untuk belanja UMKM sekitar Rp 1,3 triliun dari belanja barang jasa sebesar Rp 1,9 triliun.

“Tahun depan, kami akan terus memprioritaskan belanja barang jasa dari UMKM,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel, Yanuar Rifa'i, menambahkan pemerintah provinsi sudah membentuk Tim P3DN dalam percepatan target pengalokasian anggaran 40 persen.

Dinas Koperasi dan UMKM, kata Rifa'i, juga sudah melakukan upaya untuk masuk ke e-katalog belanja barang jasa dengan melakukan pelatihan dan bimbingan.

“Untuk mengetahui seberapa besar anggaran terserap dari UMKM, datanya ada di Biro Barang dan Jasa melalui aplikasi Bekantan dengan nilai di bawah Rp 200 juta,” katanya.

Sumber berita:

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/27/belanja-pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan-dari-pelaku-umkm-mencapai-rp-13-triliun, Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dari Pelaku UMKM Mencapai Rp 13 Triliun, (27/04/22)

2. https://berita.baca.co.id/73642193?origin=relative&pageId=2b0ea117-35cc-443a-9d0b-a637290b1f54&PageIndex=3, Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Pelaku UMKM Mencapai Rp 13 Triliun, (27/04/22)

Catatan:
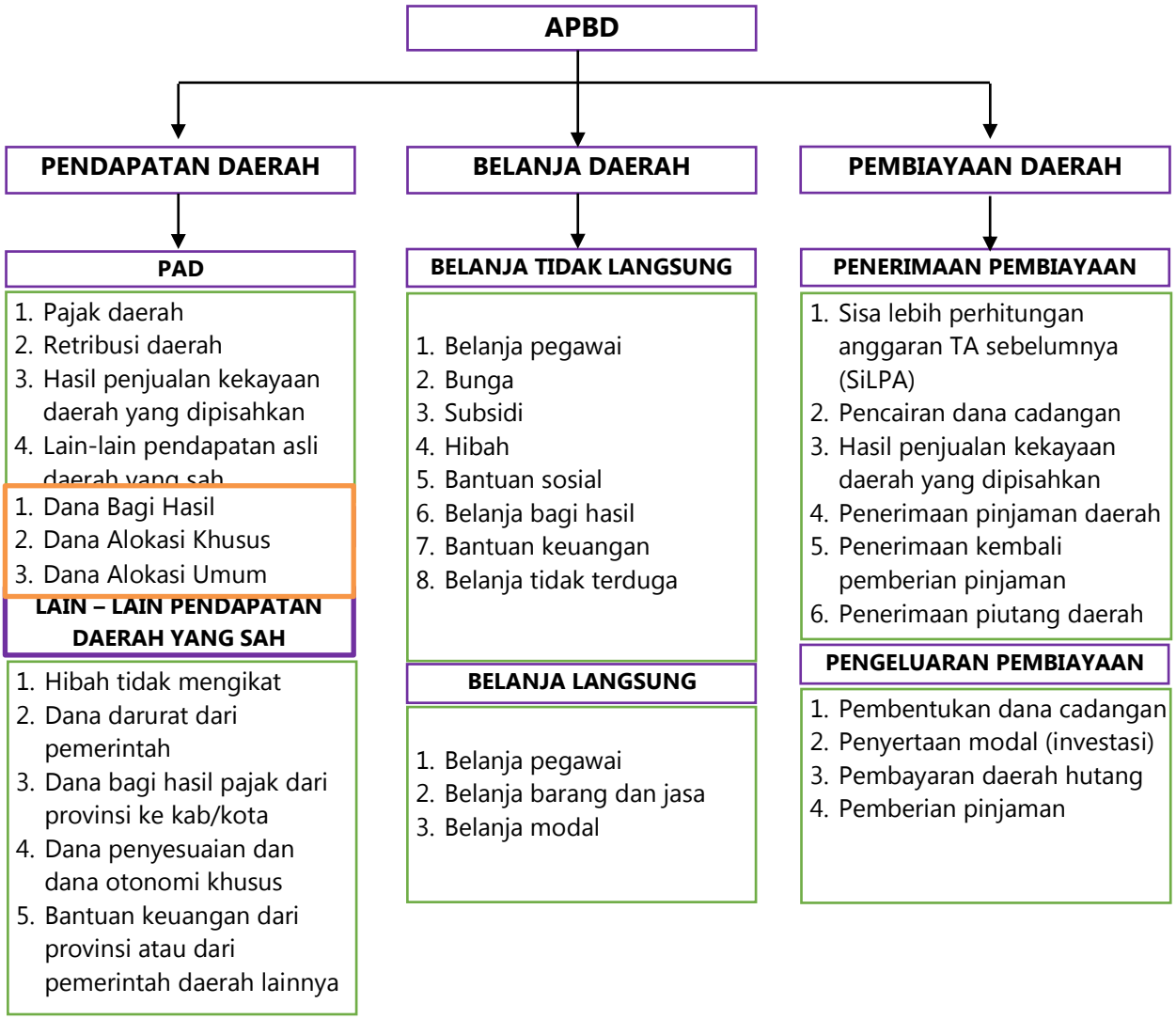
- PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto (http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)
- Struktur APBD